

Pendidikan bagi masyarakat miskin di Yogyakarta

oleh:

Yumi Hartati

Universitas Negeri Yogyakarta
yumihartati@uny.ac.id

Emilia Alya Sabilla

Universitas Negeri Yogyakarta
emiliaalya.2019@student.uny.ac.id

submitted: 19-09-21

revised: 02-01-22

accepted:03-03-2023

Abstrak

Pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sayangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi. Penelitian menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan menemukan sebab-sebab permasalahan serta solusinya melalui kajian dari referensi dan jurnal hasil penelitian yang sesuai dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan untuk dapat memberikan akses bagi masyarakat miskin agar dapat menempuh dan mengakses pendidikan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan tinggi, kemiskinan, kebijakan pemerintah

Abstract

Higher education which has an essential role in national development, has the right to be accessed by every citizen. However, the irony is that the higher the level of education, the lower the participation rate. It can be caused by several factors, one of which is the problem of access to higher education, experienced mainly by the poor. The research uses a literature study method by finding the causes of the problem and the solution through a study of references and research journals that follow the topic. The results of the study indicate that the role of the government needed to set policies to provide access for the poor so that they can take and access higher education more easily without discrimination.

Keywords: *higher education, poverty, government policy*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di segala aspek sehingga dapat menjalani kehidupan yang memiliki cita-cita dan bertujuan pasti. Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk warga negara. Amanat konstitusi bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan merupakan salah satu tugas yang penting untuk dituntaskan. Pendidikan gratis merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh pendidikan secara layak. Pendidikan mempunyai korelasi dengan pendapatan seseorang dengan berbagai teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatannya. Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education* (Suparlan & Suhartono, 2008).

Praktik pendidikan diharapkan dapat menciptakan kemajuan pada semua kelompok masyarakat, khususnya dalam membangun individu dan kelompok masyarakat sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya di satu sisi, serta dapat mempersiapkan individu dan kelompok masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja di sisi yang lain (Dardiri, 2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada diri peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam mencerahkan peradaban nasional serta mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri serta bertanggung jawab. Pendidikan sering dipandang sebagai persiapan untuk kehidupan yang lebih baik (Suparlan & Suhartono, 2008).

Namun sebgaiian besar warga masyarakat mendapat hambatan dalam mengakses pendidikan disebabkan oleh faktor kemiskinan, suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu: pangan, sandang, maupun papan merupakan indikator ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang menjadi salah satu indikator kemiskinan. Pendapatan perkapita yang rendah merupakan sebab dari kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat (Nugroho, 1995). Rendahnya pendapatan perkapita di DIY disebabkan oleh jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Angka pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan akan berdampak pada pendapatan yang berakibat dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat akan merosot. Tingginya angka pengangguran secara ekonomi berpeluang menurunkan kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat.

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan terbatasnya tingkat pengetahuan dan keterampilan akibat dari keadaan masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Terdapat banyak anak-anak yang dalam posisi usia sekolah namun tidak mendapatkan akses pendidikan akibat dari masalah kemiskinan. Salah satu hambatan untuk mendapatkan akses pendidikan karena faktor kemiskinan, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan (Jonaidi, 2012:141). Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dengan standarkehidupan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar menurut ukuran tertentu. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menurut standard yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan menurut standard masyarakat disebut kemiskinan relative (Ferezagia, 2018). Sebagai analogi adalah seseorang yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki pendapatan yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi pendapatannya masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya (Vitria & Kholilah, 2019).

Semakin tinggi pendidikan, semakin besar harapan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak sehingga minat untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi menjadi besar di kalangan masyarakat. Keluarga dari golongan ekonomi yang tinggi lebih mengarahkan anaknya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena berbagai aspek seperti prestise, ekonomis, maupun lainnya. Berbeda dengan golongan yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi rendah, para orang tua menyarankan untuk mencari pekerjaan guna mempertahankan hidup dalam memenuhi kebutuhan (Amaliah, 2015).

Keterbatasan biaya merupakan alasan umum sebagian besar lulusan SMU sederajat tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Biaya pendidikan tinggi yang umumnya masih tinggi merupakan alasan terpenting lulusan SMA tidak melanjutkan pendidikan.

Mihae, Titan, dan Manea (2015) menyatakan bahwa pendidikan dan pembangunan ekonomi memiliki korelasi langsung terhadap kemiskinan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan nasional sehingga pendidikan tinggi merupakan sebuah kebutuhan mendasar untuk meningkatkan intensitas pembangunan nasional.

A great deal of theoretical debates about the role of education in development and economic growth and, consequently, in combating poverty, are focused on the productive aspect, in the economic sense, of education. There are many statistics and reports showing that the level of schooling of population is correlated with the level of economic development.

Kehadiran pemerintah selaku penentu kebijakan pendidikan merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang kerap kali dirasakan oleh masyarakat miskin atau ekonomi rendah dalam menempuh pendidikan. Harapannya pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pendidikan, pembangunan ekonomi, serta reduksi angka kemiskinan merupakan agenda yang perlu untuk diperkuat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi.

As we know, economic growth and employment are fundamental elements in the fight against poverty and social exclusion. But, let us not forget that in order to reduce poverty, it is required an extensive set of social policies, including policies for directed education, this being due to the fact that education and training have a direct impact on what people can and can't do (Mihae, Titan, dan Manea, 2015: 857).

Kebijakan secara etimologis diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang memiliki arti kota. Kebijakan berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan menjadi pola formal yang diterima pemerintah untuk mencapai tujuannya. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang penuh dengan kehati-hatian oleh pengambil keputusan puncak, bukan kegiatan berulang maupun rutin yang terprogram atau berkaitan dengan aturan keputusan. Hough (1984) juga berpendapat mengenai kebijakan yaitu kebijakan dapat menunjuk pada seperangkat tujuan, terencana, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan. Sistem Pendidikan nasional baik di tingkat makro maupun mikro mempunyai peranan signifikan dalam meningkatkan mobilitas sosial ke atas. Oleh karenanya kebijakan dalam bidang pendidikan begitu penting untuk dapat memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Educational systems, both at the micro and macro-level, have an important role in

supporting social upward mobility. Education in all its forms, in my opinion, is one of the most important factors in breaking the vicious circle of intergenerational transmission of poverty (Mihae, Titan, dan Manea, 2015: 857).

Tilak (Rizal, 2015) meneliti mengenai hubungan antara pendidikan dan kemiskinan, dengan menunjukkan diagram plot dan hasil analisis regresi sederhana antara rata-rata lama sekolah dengan persentase penduduk miskin. Tilak menyimpulkan bahwa ketika partisipasi pendidikan meningkat, maka proporsi penduduk miskin mengalami penurunan. World Bank (1995) juga menetapkan bahwa pengembalian investasi pendidikan dasar lebih tinggi daripada pengembalian investasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sehingga berkesimpulan bahwa pendidikan dasar dan melek huruf sebagai agenda untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, maupun pembangunan manusia.

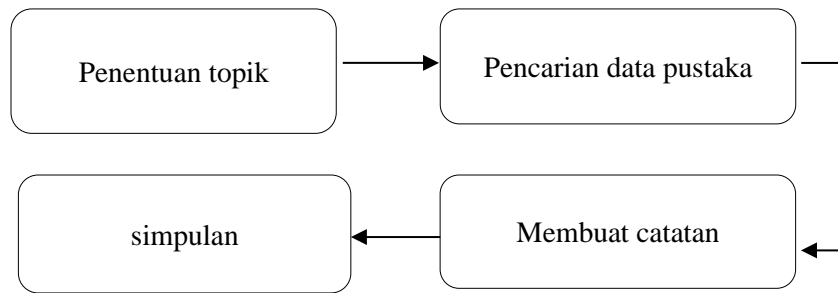
Berkaitan dengan konteks tersebut, maka kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi begitu penting untuk dikaji. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang dikenal sebagai kota pendidikan apakah telah menerapkan kebijakan yang mengakomodasi aksesibilitas penduduk yang miskin sehingga dapat mengentaskan mereka dari lingkaran kemiskinan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau yang biasa disebut *literature review*. Moleong (2011) menyatakan bahwa studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau referensi dari hasil penelitian yang telah ada dan pernah dilakukan mengenai topik masalah yang hampir sama sehingga terdapat perbandingan atau penguat analisis. Kepustakaan digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Teknik pengumpulan data dalam karya tulis ini dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hussaini (2009) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Langkah-langkah penelitian pustaka yang dilakukan meliputi: (1) pemilihan topik penelitian; (2) pencarian data pustaka; (3) membuat catatan; (4) membuat simpulan.

Beberapa perpustakaan yang dikunjungi untuk memperoleh sumber dan bahan pustaka antara lain: Perpustakaan UNY, Perpustakaan UGM, Perpustakaan DIY, dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, di Yogyakarta. Gambaran dari kegiatan penelitian dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau sekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang terdapat dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk (Hendra, 2010). Menurut Mudrajad Kuncoro (Juariyah, 2010) menyatakan bahwa untuk mengurangi atau memperkecil angka kemiskinan, masyarakat miskin perlu mendapatkan berbagai akses seperti: akses terhadap lapangan pekerjaan, faktor produksi, akses pasar dan akses kepemilikan aset, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan sebagai fasilitas layanan publik.

Kemiskinan memang bukanlah masalah baru. Berdasarkan ukuran kehidupan modern pada masa kini, kemiskinan dapat berarti bahwa masyarakat tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makanan. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi secara nasional. Berdasarkan lima (5) kabupaten/kota yang terdapat di DIY,

Gunung Kidul dan Kulon Progo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang terbanyak.

Tabel 1
Kemiskinan DIY Tahun 2019-2021

Kabupaten (Kota)	Jumlah Penduduk (Ribuan)		
	2019	2020	2021
Kulonprogo	74,62	78,06	81,14
Bantul	131,15	138,66	146,98
Gunungkidul	123,08	127,61	135,33
Sleman	90,7	99,78	108,93
Yogyakarta	29,45	31,62	34,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D. I. Yogyakarta

Dari Tabel 1 terlihat bahwa angka kemiskinan di DIY mengalami kenaikan selama 2019 sampai 2021. Bantul dan Gunung Kidul merupakan dua kabupaten yang mengalami kenaikan signifikan dalam penambahan jumlah penduduk miskin. Pandemi Covid 19 menjadi sebab utama bertambahnya angka kemiskinan di berbagai daerah yang disebabkan oleh kesulitan yang dialami dalam berusaha dan kegiatan ekonomi lainnya yang cenderung berhenti. Sampai September 2013, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 535.180 orang atau 15,03 persen dari total penduduk DIY. Jumlah tersebut menurun sedikit dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 15,88 persen. Angka ini yang paling tinggi di seluruh provinsi di Pulau Jawa (Saragih, 2015).

Dilihat dari karakteristiknya, penduduk miskin di DIY ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan. Kulon Progo dan Gunung Kidul merupakan dua kabupaten yang memiliki karakteristik ini. Lingkungan sosial yang kurang mendukung bagi peningkatan partisipasi pendidikan merupakan salah satu agenda persoalan yang perlu mendapatkan perhatian (Juariyah, 2010). Kurangnya tingkat pendidikan menjadikan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah ini. Pekerjaan yang dapat diakses oleh penduduk pada umumnya adalah sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pertanian, dan pekerjaan lain yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan.

Pendekatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah dilakukan dengan dua hal yaitu (1) *basic need approach* dan (2) *head count index*. Pendekatan pertama mengacu pada pendekatan yang mendorong masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Pendekatan kedua mengacu pada ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut,

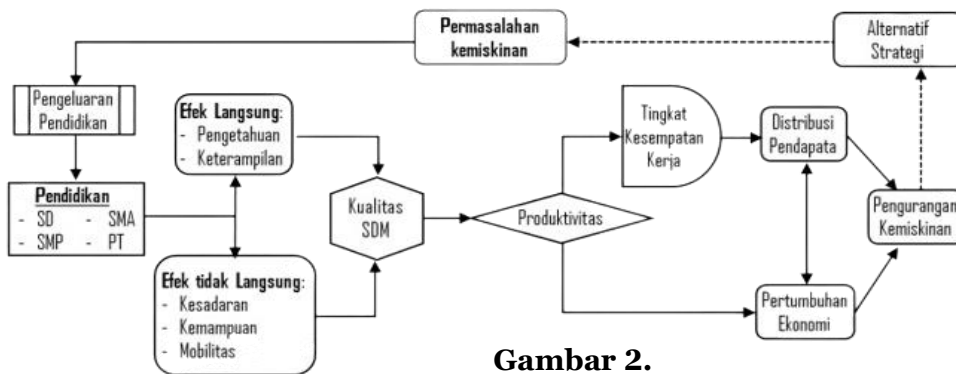
artinya, penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan makanan-minuman dan nonmakanan minuman. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu (1) garis kemiskinan makanan (*food line*) dan (2) garis kemiskinan nonmakanan (*nonfood line*) (Saragih, 2015; Niswati, 2014).

Teori perangkap kemiskinan lainnya juga dikemukakan oleh Meier dan Baldwin yang menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu masyarakat, setidaknya terdapat ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian (*skill*) untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara-negara berkembang, kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah sehingga menyebabkan kurangnya tenaga ahli yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya yang ada di negara tersebut, termasuk keterbatasan modal (Sukirno, 1985). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru penting untuk mengurangi kemiskinan, di samping kebijakan non ekonomi lain, seperti manajemen kejutan (*shock policy*) dan jaring pengaman (*social safety net*) yang dapat terus diterapkan (Kuncoro, 2004).

Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan mencakup tujuan pendidikan sehingga dapat mencari cara mencapai tujuan tersebut. Menurut Nugroho (1995), kebijakan pendidikan merupakan kunci keunggulan bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

Pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayatnya. Pendidikan bagi individu yang berasal dari masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi. Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM). Berkaitan dengan konteks tersebut maka pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang secara ekonomi memberikan nilai tambah. Negara yang memprioritaskan pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusianya (SDM), menganggap bahwa melalui pendidikan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia pada suatu negara dapat dilihat dari indek pembangunan sumber daya manusia (HDI) sebagai suatu tolok ukur kemajuan dan keunggulan pendidikan (Rasyid, 2015).

Pendidikan tinggi merupakan investasi SDM yang dalam jangka panjang dapat menjadi indikator keunggulan bangsa. Awan et al. (2011) mengevaluasi efek dari berbagai tingkat pendidikan, pengalaman dari individu yang bekerja menurut jenis kelamin sebagai variabel penjelas, dan individu miskin sebagai variabel terikat dalam penentu kemiskinan di Pakistan pada tahun 1998–1999 dan 2001–2002. Melalui model regresi logistik, hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman dan tingkat pendidikan berhubungan negatif dengan kemiskinan pada dua periode tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka probabilitas menjadi miskin semakin berkurang. Keterkaitan pendidikan dan reduksi kemiskinan dapat dilihat melalui gambaran berikut.



Gambar 2.
Pendidikan dan kemiskinan
 Sumber: Rizal (2015)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Namun ternyata belum semua penduduk DIY dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Aksesibilitas pendidikan tinggi yang masih rendah di DIY memang tidak semata-mata didasarkan pada variabel kemiskinan, namun juga dilatarbelakngi oleh faktor lain seperti kultural. Masih banyak warga masyarakat terutama di pedesaan yang beranggapan bahwa pendidikan tidak penting, apalagi perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi tidak dianggap sebagai investasi yang memberikan kesempatan ekonomi lebih baik di masa mendatang. Berikut disajikan tabel aksesibilitas penduduk DIY terhadap pendidikan tinggi.

Tabel 2
Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah mahasiswa
Kulonprogo	597

Bantul	74.925
Gunungkidul	956
Sleman	205.293
Kota Yogyakarta	86.295

Sumber : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan angka 597, hal tersebut merupakan angka paling kecil diantara ke empat kabupaten/kota lainnya. Jika dikaitkan dengan Tabel 1 Kabupaten Kulonprogo memiliki garis kemiskinan terendah kedua di D. I. Yogyakarta kemudian pada tabel jumlah partisipasi kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa D. I. Yogyakarta masih memerlukan perhatian besar dalam meminimalisir angka kemiskinan.

Salah satu permasalahan dari masyarakat miskin yaitu dalam rangka mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi tidak semua manusia dapat mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah ekonomi. Masyarakat yang ekonominya tidak mampu maka sulit untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi tingkat pendidikan tinggi, karena untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi Kulonprogo memiliki angka paling kecil.

Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Terjadinya fenomena kasus putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor biaya. Sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi dan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahal biaya pendidikan sehingga orang miskin memang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk bertahan hidup (Supardi & Hasanah, 2020).

DPR-RI untuk merespons hal ini, membuat pengaturan berupa UU Pendidikan Tinggi untuk mengatasi mahal biaya dan persoalan sebaran pendidikan tinggi di Indonesia. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan akses dilakukan melalui jaminan

pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, serta perluasan sebaran perguruan tinggi melalui program akademi komunitas dan program pendidikan jarak jauh. Masyarakat memang sudah lama mendambakan pendidikan yang ideal dan bermutu tinggi dan mampu diakses oleh berbagai kalangan (Ali, 2017). Sejatinya akses pendidikan gratis diberikan pemerintah kepada para peserta didik di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir. Namun, pada pendidikan di atasnya setara perguruan tinggi masih yang perlu diperhatikan. Mulai dari penyampaian informasi tentang pembebasan biaya untuk mahasiswa miskin. Disisi lain dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan info tersebut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, masyarakat belum mengetahui tentang program bantuan pendidikan dari pemerintah.

Pada Seminar Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan (Dispora) Kabupaten Gunungkidul, Kamis (18/06) siang, mengisahkan bahwa beberapa pertanyaan sering masuk ke media sosialnya tentang takut tidak sanggup membayar kuliah. Pada tahun 2020, Pemerintah melaksanakan program bantuan pendidikan untuk mahasiswa bertajuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Peserta didik yang cerdas namun memiliki keterbatasan ekonomi, akan difasilitasi kuliah gratis dan mendapat uang saku bulanan. Sesuai dengan siaran resmi Kemdikbud Nomor 34 tahun 2020, para calon mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu dan lulus SMA, SMK, MA sederajat pada 2018-2020, dapat mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah tahun 2020. Para calon mahasiswa baru dengan kualifikasi tersebut dapat mulai mendaftar menjadi penerima KIP Kuliah pada awal Maret 2020.

Bagi pemerintah daerah sendiri, tugas berat menanti pasca diamanatkannya penghitungan dan pencarian solusi atas BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan), instrumen baru untuk menghitung kekurangan biaya operasional pendidikan yang tak terpenuhi oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Seperti diketahui, BOS yang diluncurkan pemerintah nasional pada tahun 2005, kenyataannya hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan operasional sekolah-sekolah negeri pada jenjang SD hingga SMP.

Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha memberikan jaminan agar setiap warga negara yang tidak mampu secara ekonom ini setidaknya yang tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta dapat menikmati pendidikan hingga level sekolah atas. Dengan demikian, angka putus sekolah dapat dihapuskan dari kota pendidikan. Mengingat pentingnya misi, fungsi, dan peran pendidikan tinggi menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu bagian dari jenjang pendidikan formal yang menjadi kunci dalam sektor penting pembangunan bangsa. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang mampu mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki.

Simpulan

Mengingat pentingnya misi, fungsi, dan peran pendidikan tinggi menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu bagian dari jenjang pendidikan formal yang menjadi kunci dalam sektor penting pembangunan bangsa. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang mampu mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Karakteristik penduduk miskin di DIY juga dapat ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk. Sebagian besar penduduk dengan pendapatan per kapita rendah, dan keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Namun, dalam hal akses pendidikan DIY telah membukakan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sehingga masyarakat miskin dapat merasakan bangku sekolah tanpa harus memikirkan biaya sekolah. Kendalanya adalah pada pendidikan setara perguruan tinggi yang masih perlu peningkatan, karena masih terdapat kesulitan-kesulitan.

Reference

- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Amaliah, D. (2015). Pengaruh partisipasi pendidikan terhadap presentase penduduk miskin. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 231-239. Retrieve from <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/view/595/561>
- Awan. (2011). Impact of education on poverty reduction. *International Journal O F Academic Research*. Vol. 3. No. 1. January, 2011, Part II. <https://paper.researchbib.com/?action=viewPaperSearch&start>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Dardiri, A. (2005). Mengenal filsafat pendidikan Richard Rorty, *Dinamika Pendidikan*, 12(1), 1-12. Retrieve from <https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamika-pendidikan/article/view/5921/5119>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 145-156. Retrieve from: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1/>
- Hendra (2010). *Anggaran berbasis kinerja : penyusunan APBD secara komprehensif*. UPP STIM YKPN.
- Hussaini, U. (2009). *Manajemen teori praktik dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Jonaidi, Arius. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 1 (1): 141. Retrieve from: <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/742/611>

- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosialekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1). Retrieve from: <https://journal.uny.ac.id/index.php/je/p/article/view/577>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi daerah dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mihaela Mihai, Emilia Titan, Daniela Manea, (2015), Education and poverty, *Procedia Economics and Finance* 32, (2015) 855 – 860. doi: 10.1016/S2212-5671(15)01532-4
- Moleong, L.J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Niswati, K. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2011. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 9(1), 143-153. Retrieve from: <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/eko-regional/article/view/480/0>
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media.
- Nugroho, P.A. (2015). Pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasyid, H. (2015). Membangun generasi melalui pendidikan sebagai investasi masa depan, *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 565-581. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>
- Rizal, N. R. (2015), Apakah jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16 (1), 15-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596>
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 45-59 <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/155>.
- Sukirno, S. (1985). *Pengantar teori mikroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Supardi & Hasanah, E. (2020). Junior high school students' experiences of high technology based learning in Indonesia, *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(5), 155-167 DOI: <https://doi.org/10.26803/ijlter.19.5.9>
- Suparlan & Suhartono. (2008). *Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan*. Ar-Ruzzmedia Group.

Pendidikan bagi masyarakat (Yumi Hartati, dkk.)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vitria, D., & Kholilah, K. (2019). Minat remaja melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ditinjau dari kondisi ekonomi keluarga di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan. *JUANG: Jurnal Wahana Konseling*, 2(2). <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/juang/article/view/3323>.